

Jurnal of Development Economic and Digitalization

Vol. 2, No. 1, 2023, pp. 20-35
P-ISSN 2963-6221 – E-ISSN 2962-8520

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PADA PROVINSI DI PULAU SULAWESI

Fiona Virdam^{1*}, Maria Bernadette Nani Ariani²

¹fionavirdam@upnvj.ac.id, ²nani.ariani@upnvj.ac.id,

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Penulis Korespondensi

Received: 15 Januari 2023

Published: 28 Februari 2023

Abstrak

Masyarakat di setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda, hal tersebut dapat menjadi perbedaan dalam meraih pendidikan. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* di enam (6) provinsi selama tahun 2014-2021, sehingga total sampel sebanyak 48 data yang didapatkan melalui website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yaitu menggabungkan data *cross section* dan *time series* dengan menggunakan program Stata-14 dan tingkat signifikansinya sebesar 5% (0,05). Model terbaik yang terpilih dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), sementara penelitian ini memperoleh hasil secara parsial menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikarenakan semakin tinggi nya pendapatan yang diperoleh maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk bersekolah, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebab tingginya kemiskinan menjadikan masyarakat hidup miskin dengan pendapatan rendah dan menciptakan produktivitas juga rendah maka hal tersebut membuat seseorang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam mengakses fasilitas pendidikan, dan jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikarenakan dengan adanya penyebaran dan pemerataan jumlah sekolah membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses fasilitas pendidikan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Kata Kunci: Angka Partisipasi Sekolah; PDRB per Kapita; Tingkat Kemiskinan; Jumlah Sekolah.

Abstract

Communities in each region have different resources, which leads to differences in access to educational institutions. The purpose of this study is to determine the impact of her per capita income, poverty level, and number of schools on school enrollment ratios (APS) in all provinces of Sulawesi. The sample used in this study was from the official website of Central Statistics Indonesia, used a purposive sampling technique in six provinces for the period 2014-2021, so that a total sample 48 data. In this study using panel data regression analysis, which combines cross section and time series data using the Stata-14 program and a significance level of 5% (0.05). The best model chosen in this study is the Fixed Effect Model (FEM), while this research partially obtains results showing that income per capita has a positive and significant effect on school enrollment rates (APS) due to the higher income earned, the community can meet their needs. their lives including going to school, the poverty rate has a negative and significant effect on the School Enrollment Rate (APS) because high poverty makes people live in poverty with low incomes and creates low productivity, this makes it difficult for a person to fulfill their daily needs, including accessing educational facilities, and the number of schools has a positive and significant effect on the School Participation Rate (APS) due to the distribution and equity of the number of schools making it easier for people to access educational facilities. The results of this simultaneously show that income per capita, level of poverty, and number of schools influence school participation rate (APS).

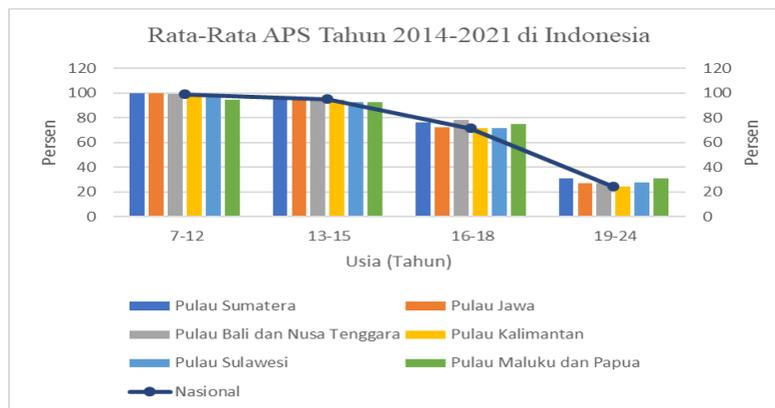
Keywords: *School Participation Rat; Income per Capita; Poverty Rate; Number of Schools.*

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia adalah salah satu sumber modal yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk mendorong produktivitas pembangunan, SDM dapat diwujudkan sebagai modal manusia melalui pendidikan yang berkualitas. Dalam teori *HumanCapital* yang dijelaskan oleh Becker (1965) bahwa bagian dari investasi *human capital* yang sangat penting yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan sarana pengembangan sumber daya manusia untuk dapat menciptakan SDM yang berkualitas sehingga pembangunan nasional dapat meningkat. Berdasarkan hal tersebut masyarakat dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih layak melalui pendidikan, dimana nantinya masyarakat dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dan akan berdampak pada perekonomian nasional.

Persentase partisipasi penduduk yang bersekolah menunjukkan salah satu bentuk peningkatan mutu dan ketersediaan sarana pendidikan di suatu wilayah. Untuk melihat seberapa besar majunya bidang pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah atau selanjutnya disebut APS. (Silviliyana, Maylasari, Agustina, Dewi, & Sulistyowati, 2019).

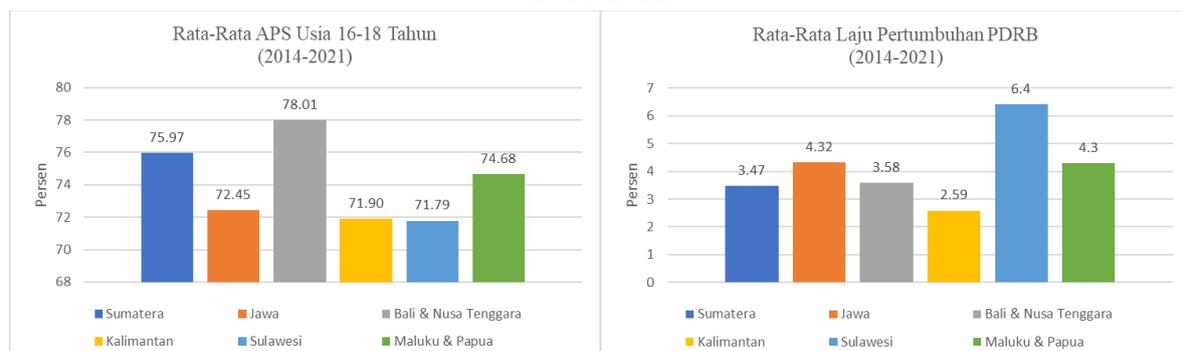
Gambar 1. Grafik Rata-Rata APS Tahun 2014-2021 di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Dilihat dari Grafik 1 dapat diketahui rata-rata APS kelompok umur 16-18 cenderung rendah jika dibandingkan dengan rata-rata APS golongan umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Besaran nilai APS pada setiap pulau berbeda karena adanya perbedaan dalam kondisi ekonomi, sosial, budaya, demografi, SDA dan SDM, serta kebijakan atau peraturan pemerintah setempat sehingga terjadinya perbedaan angka partisipasi sekolah tiap daerah.

Gambar 2. Grafik Rata-Rata APS dan Laju Pertumbuhan PDRB di Indonesia tahun 2014-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Pemerintah Indonesia berupaya memajukan pendidikan yaitu dengan menerapkan wajib belajar 12 tahun, melalui tingkat pendidikan paling tinggi adalah SMA sederajat pada seluruh wilayah Indonesia. Namun, rata-rata APS umur 16-18 memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata APS umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

Di lihat pada grafik 2. di atas rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap pulau berbeda. Pada 6 pulau yang tertera, Pulau Sulawesi pada tahun 2014-2021 memiliki rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) terendah hanya sebesar 72,43%. Pulau Sulawesi termasuk kawasan Indonesia tengah. Selain itu, pada pertumbuhan PDRB di Pulau Sulawesi pada tahun 2014-2021 cenderung tinggi dan adanya kenaikan pada setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan PDRB di pulau Sulawesi dari tahun 2014 hingga 2021 sebesar 6,4%.

Laju pertumbuhan PDRB adalah bagian dari indikator makro ekonomi yang menunjukkan seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu (Pemerintah Kabupaten Asmat, 2015). Dalam hal ini, Pulau Sulawesi dengan laju pertumbuhan PDRB yang terus meningkat dan cenderung tinggi seharusnya mempunyai partisipasi masyarakat untuk bersekolah juga tinggi karena mempunyai kemudahan dalam mengakses sarana pendidikan, tetapi kenyataannya tidak demikian (Suwandana, 2018). Fenomena inilah yang mendasari peneliti untuk memilih seluruh provinsi di Pulau Sulawesi sebagai lokasi penelitian.

Partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan sebagai salah satu investasi modal manusia dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dalam penelitian (Sartiyah, Hartoyo, Syaikat, & Oktaviani, 2017) rendahnya pendapatan membuat masyarakat sulit dalam meraih fasilitas pendidikan, kemiskinan yang tinggi juga dapat jadi salah satu penyebab sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak (Rahmatin & Soejoto, 2017). Selain itu, jumlah sekolah juga memiliki peran sebagai salah satu fasilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menempuh pendidikan secara langsung dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat (Rahmadeni, Samsinar, & Desvina, 2020). Berdasarkan hal-hal di atas, berikut grafik yang dapat memperlihatkan perkembangan faktor-faktor sebagai berikut.

Gambar 3. Grafik APS dan PDRB per Kapita Pada Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2021



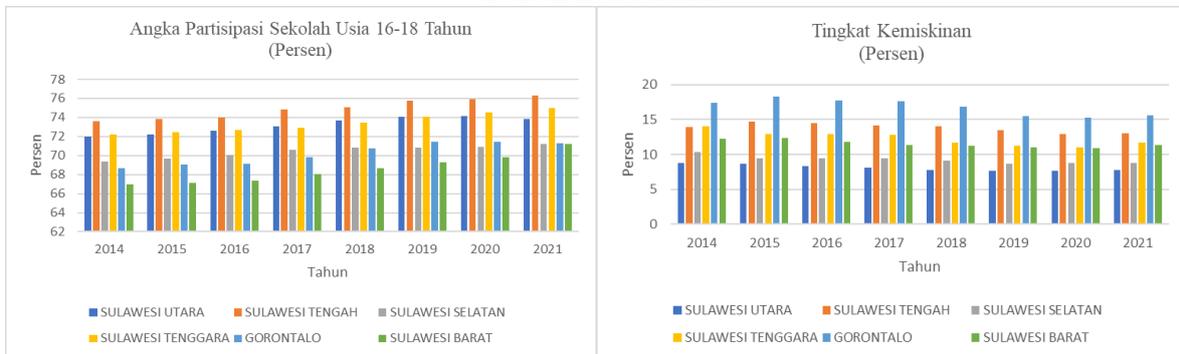
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Pada Grafik 3 dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, peningkatan ini lumayan cepat sebesar lebih dari 4% di setiap tahunnya, besarnya PDRB per kapita disetiap provinsi memiliki perbedaan satu sama lain. PDRB per kapita merupakan bagian dari gaji atau penghasilan yang di dapatkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan produktivitas/pekerjaan yang dimiliki individu. Smith (1723-1790) berpendapat bahwa dalam pekerjaan yang sukar, upahnya akan lebih tinggi. Pekerjaan yang sukar tersebut dapat dipelajari melalui pendidikan, termasuk bersekolah karena tantangan pekerjaan harus dipelajari sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meraih

pendidikan secara tidak langsung dapat mendorong tercapainya gaji atau penghasilan lebih meningkat.

Pendapatan per kapita dapat menunjukkan keadaan ekonomi seseorang dimana besarnya penghasilan yang diperoleh maka APS akan meningkat karena mereka mampu memenuhi kebutuhan sektor pendidikan untuk pemenuhan partisipasi sekolah, namun hal tersebut tidak terjadi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan grafik 3. di atas PDRB per kapita pada tahun 2021 Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan yang semula 24.313 naik menjadi 24.650 hal tersebut terjadi karena adanya pertumbuhan yang terjadi hampir diseluruh kategori. Pertumbuhan tertinggi ada pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sertadiikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori jasa keuangan dan asuransi (Gorontalo, 2022). Kenaikan PDRB per kapita di Provinsi Gorontalo pada 2021 tidak diikuti naiknya APS melainkan APS di Provinsi Gorontalo tahun 2021 mengalami penurunan 0,13% yang semula pada tahun 2020 71,43% menjadi 71,3% pada tahun 2021. Penurunan APS terjadi karena siswa pada jenjang sekolah menengah rentan tidak melanjutkan atau putus sekolah karena merasa sudah cukup dengan pendidikan yang sudah diperoleh dan memilih mencari kerja (BPS Provinsi Gorontalo, 2021). Kemampuan masyarakat tidak hanya tercermin dari PDRB per kapitanya saja, melainkan dapat terlihat juga pada tingkat kemiskinan. Berikut grafik perkembangan tingkat kemiskinan.

Gambar 4. Grafik APS dan Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2021



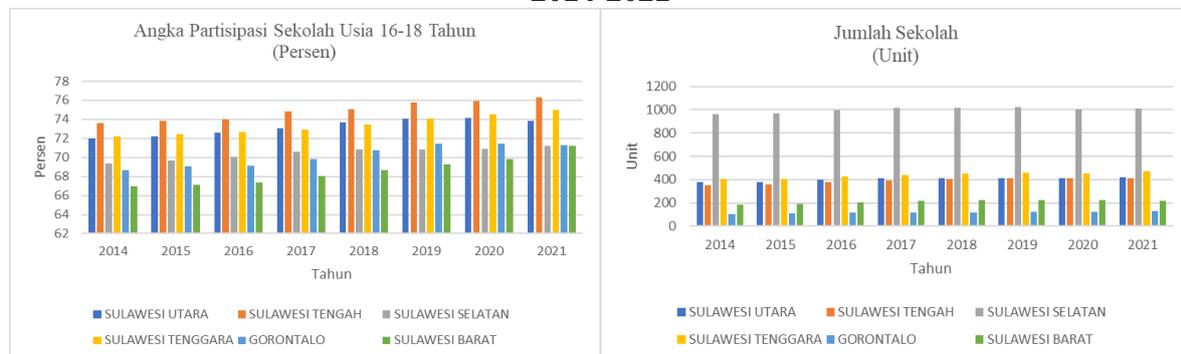
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Pada Grafik 4. diatas terlihat bahwa disetiap provinsi cenderung mampu menurunkan tingkat kemiskinan penduduknya pada tahun 2014-2020 dengan rata-rata penurunan 0,5%, namun pada tahun 2021 terlihat bahwa setiap provinsi yang ada mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,3%. Tingkat kemiskinan yang tinggi masih dialami di beberapa provinsi. Menurut Nurkse, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat hidup miskin dengan penghasilan yang sedikit dan secara tidak langsung dapat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi pendidikan pada akhirnya dapat menurunkan produktivitasnya, namun hal ini tidak terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2021 kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah terjadi peningkatan 0,08%. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,92% dan pada tahun 2021 naik menjadi 13%, tingginya kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 masih diatas kemiskinan nasional. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh komoditi makanan mencapai 76,68% sedangkan komoditi bukan makanan mencapai 23,32% (Wiranata, 2021). Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah tidak membuat masyarakat putus asa dalam menempuh pendidikan, hal ini terlihat dari naiknya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2020 ke 2021. Pada Grafik 4. di atas terjadi kenaikan Angka Partisipasi Sekolah yang semula pada tahun 2020 sebesar 75,89% naik 0,43% menjadi 76,32% pada tahun 2021. Semangat serta kemauan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dalam melanjutkan pendidikan dapat di bilang cukup besar karena Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2021 lebih tinggi 3,23% dari

APS nasional. Selain itu, peran pemerintah juga penting dalam meningkatkan partisipasi sekolah dengan memberi beasiswa pada masyarakat yang kurang mampu

Kemudian selain PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan, tujuan peningkatan partisipasi sekolah khususnya untuk masyarakat tidak mampu dapat didukung dengan peningkatan bangunan atau gedung sekolah yang disediakan pemerintah yakni perencanaan berdirinya sekolah-sekolah baru. Berikut grafik perkembangan jumlah sekolah tingkat pendidikan SMA/SMK yang sebagian besar ada pada kalangan umur 16-18 tahun.

Gambar 5. Grafik APS dan Jumlah Sekolah Pada Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Pada Grafik 5. di atas terlihat bahwa dari tahun 2014-2021 jumlah sekolah di setiap provinsi bertambah dan ada juga yang berkurang. Neilson dan Zimmerman (2014) berpendapat bahwa membangun sekolah di wilayah miskin dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan upaya dalam penyediaan sarana pendidikan seperti gedung sekolah yang dekat dapat memicu partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Rahmatin & Soejoto, 2017). Menurut Johri cara peningkatan partisipasi sekolah khususnya pada masyarakat tidak mampu dapat didukung dengan peningkatan bangunan atau gedung sekolah. Gedung sekolah berfungsi sebagai tempat interaksi guru dan siswa selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Proses berlangsungnya pendidikan disekolah sangat berkaitan dengan ketersediaan ifrastruktur, termasuk gedung sekolah (Parmo, Sucipto, & Sumarkan, 2016).

Pada Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah sekolah terbanyak diantara provinsi lain yang ada. Jumlah sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebanyak 1.011 unit dan APS nya pada tahun yang sama hanya 71,21%. Berbeda dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 jumlah sekolah hanya 411 unit namun APS nya sebesar 76,32%. Sedikitnya jumlah sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah tidak membuat masyarakatnya putus asa dalam menempuh pendidikan, maka dari itu partisipasi sekolah di Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah tetap tinggi dan jumlah sekolah yang ada mampu mawadahi masyarakat usia sekolah.

Penelitian mengenai APS telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian (Sartiyah, Hartoyo, Syaikat, & Oktaviani, 2017), mengungkapkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS. Selanjutnya, hasil dari penelitian (Karini, 2018) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap APS. Hasil penelitian (Rahmadeni, Samsinar, & Desvina, 2020) mengungkapkan bahwa jumlah sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap APS.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah yaitu, (1) bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap APS pada Provinsi di Pulau Sulawesi, (2) bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap APS pada Provinsi di Pulau Sulawesi, (3) bagaimana pengaruh jumlah sekolah terhadap APS pada Provinsi di Pulau Sulawesi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita, tingkat kemiskinan,

dan jumlah sekolah terhadap APS pada Provinsi di Pulau Sulawesi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Human Capital Garry S. Becker

Becker (1965) dalam (Prasojo, Mukminin, & Mahmudah, 2017) mengemukakan bahwa bagian investasi *human capital* yang sangat penting adalah pendidikan, hal tersebut dikarenakan ketika seseorang meraih pendidikan dapat menciptakan peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan dari seseorang dan juga dapat meningkatkan pendapatannya. Tingkat pendidikan masyarakat umumnya diketahui sebagai faktor utama dalam menyongkong proses pembangunan suatu negara (Almendarez, 2016). Jika sumber daya manusia dapat dipersiapkan dengan baik dan berkualitas sebagai *human capital* untuk menjadi tenaga terampil maka akan memberikan pengaruh yang besar dan menjadi salah satu peran mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan pada suatu negara. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Smith & Marshall dan Johns & Morphet dalam (Prasojo, Mukminin, & Mahmudah, 2017) bahwa di antara semua modal yang ada, *human capital* menjadi modal paling berharga untuk diinvestasikan sementara itu peranan vital dalam ekonomi dan suatu negara juga ada pada pendidikannya.

Teori *Human Capital* mengemukakan bagaimana pendidikan mempunyai efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Manusia yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi daripada mereka yang pendidikannya rendah. Jika gaji menggambarkan produktivitas, maka semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat maka produktivitas akan semakin meningkat sehingga perekonomian nasional akan meningkat. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki korelasi positif dengan kesejahteraan hidup yang lebih layak dan lebih banyak kesempatan kerja cenderung lebih besar serta dapat menurunkan tingkat pengangguran (Adriani, 2019).

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Peningkatan kualitas individu dalam diciptakan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam proses membentuk modal manusia (*human capital*) yang berkualitas karena dalam pendidikan dapat memberikan manfaat bagi seseorang diantaranya itu diperolehnya pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan pengalaman sehingga hal tersebut akan memicu pendapatan yang tinggi dalam waktu yang tidak dapat ditentukan seiring dengan meningkatnya produktivitas kerja dan kinerja mereka (Prasojo, Mukminin, & Mahmudah, 2017). Dalam menciptakan *human capital* membutuhkan proses yang panjang karena *human capital* bukan hanya input sederhana tetapi memerankan bagian dalam proses memproduksi barang atau penyedia jasa yang lebih rumit. Berdasarkan hal tersebut, pentingnya partisipasi individu dalam meraih pendidikan sebagai salah satu bentuk input *human capital* dalam mendorong terciptanya SDM yang berkualitas sebagai modal utama bagi pembangunan nasional. Efektivitas pelaksanaan pendidikan mampu menyerap potensi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat tercermin dalam APS pada penelitian ini, yang memiliki arti menurut BPS bahwa semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin efektifnya program pendidikan.

APS menggambarkan besarnya tingkat penyerapan pendidikan formal pada empat jenjang pendidikan seseorang dan dikelompokkan menurut usianya yang terdiri dari: (1) jenjang sekolah dasar dengan mayoritas usia 7-12 tahun; (2) jenjang sekolah menengah pertama dengan mayoritas umur 13-15 tahun; (3) jenjang sekolah menengah ke atas dengan mayoritas umur 16-18 tahun; (4) jenjang perguruan tinggi dengan mayoritas umur 19-24 tahun.

PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan cerminan dan rata-rata pendapatakan yang didapatkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah atau daerah (Saraswati & Cahyono, 2014). Adapun PDRB per kapita merepresentasikan pendapatan per kapita setiap penduduk pada suatu daerah untuk melihat kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan termasuk membiayai kebutuhan pendidikan. PDRB per kapita berguna untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan ekonomi di daerah yang berhasil menyejahterakan masyarakatnya. Partisipasi pendidikan akan meningkat dapat terwujud jika semakin makmurnya masyarakatnya karena semakin mudahnya masyarakat tersebut dalam mengakses fasilitas pendidikan. Adapun kesejahteraan masyarakat yang dinilai dari penghasilan juga dapat berasal dari upah yang mereka terima. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Smith dalam (Priyono & Ismail, 2012) mengenai teori perbedaan upah yakni tingkat upah akan meningkat pada kerjaan yang lebih sulit untuk dipelajari, hal ini terjadi karena seseorang tidak akan belajar jika tidak dikompensasi dengan upah yang lebih tinggi.

Tingkat Kemiskinan

Menurut (Bado, Hasbiah, Hasan, & Alam, 2017), Nurkse memperkenalkan teori lingkaran setan kemiskinan bahwa terjadinya kemiskinan bukan hanya dikarenakan tidak adanya pembangunan pada masa lalu melainkan akan menciptakan hambatan pada pembangunan di masa mendatang. Kemiskinan menjadi keadaan yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan tersebut. Agar tidak salah mengambil kebijakan maka jumlah besar atau kecilnya kemiskinan perlu diketahui untuk mengurangi ketidakefisienan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Salah satu tanda adanya kemiskinan adalah tidak tercapainya kesejahteraan individu atau rumah tangga, dalam hal ini kekurangan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup (Samsudin, Sadiman, & Bangsawan, 2020). Tingkat kemiskinan di suatu daerah atau wilayah bermula dari pendapatan yang rendah sehingga kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi yang menyebabkan sulitnya akses pendidikan dan rendahnya kualitas gizi dan pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya produktivitas. Hal ini bermula pada rendahnya partisipasi pendidikan yang kemudian menyebabkan produktivitas rendah dan akan menyebabkan rendahnya pendapatan, hingga akhirnya menyebabkan kemiskinan sehingga individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menimbulkan kemiskinan bagi generasi selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat miskin hidup pada suatu lingkaran tidak berujung yakni berputar mulai dari kemiskinan, kemudian pendapatan yang rendah, setelah itu mengakibatkan produktivitas juga rendah, lalu produksi rendah dan kemudian pada akhirnya akan bertambah miskin.

Jumlah Sekolah

Menurut pendapat Johri dalam (Rahmatin & Soejoto, 2017) berpendapat bahwa tujuan peningkatan partisipasi sekolah terutama bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi dapat di bantu melalui peningkatan infrastruktur. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah dengan membuat rencana untuk membangun sekolah baru sebagaimana tujuan pemerataan pendidikan dalam langkah ketiga yaitu pemerataan penyediaan sekolah. Infrastruktur sarana dan prasarana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 45 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sekolah merupakan sarana atau tempat bagi seseorang khususnya siswa untuk mengetahui tentang siapa dirinya dan seperti

apa lingkungannya. Dengan kata lain, sekolah adalah tempat yang tepat untuk siswa untuk mengeksplorasi softskill dimana siswa dapat menangani persoalan-persoalan tentang dirinya dan lingkungannya. Seperti halnya siswa juga dapat belajar beradaptasi, berkomunikasi, serta menambah kemampuan pada dirinya sehingga menambah kualitas dari dirinya. Menurut E. Mulyasa dalam (Sopian, 2019), infrastruktur pendidikan adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media lainnya. Sarana prasarana diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, sebab sarana prasana menjadi salah satu faktor besar dalam kelancaran dari proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut pembangunan dan pemerataan jumlah sekolah serta terpenuhinya infrastruktur yang lebih baik dapat menjadi salah satu pendorong minat masyarakat dalam menempuh Pendidikan lebih lanjut. Membangun sekolah di daerah yang miskin dapat menyebabkan angka partisipasi yang lebih tinggi. Kondisi perekonomian penduduk kota yang jadi penghambat dalam peningkatan angka pendidikan dapat dilihat pada tingkat kemiskinan. Dengan demikian, adanya upaya penyediaan fasilitas pendidikan seperti tempat sekolah yang dekat dapat memicu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan jenis data yang digunakan yaitu bersifat kuantitatif dimana variabel-variabel yang diukur memakai data berupa angka yang didapatkan dari hasil perhitungan yang dapat dianalisis memakai sistematika dengan memakai data APS, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah yang diperoleh melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik Indonesia dengan teknik pengumpulan data dan pencarian informasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi serta studi pustaka.

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dengan faktor yang dipakai yakni PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah. Dalam penelitian ini menggunakan sampel yaitu *non probability* menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan kriteria tertentu. Sampel penelitian ini bersumber dari data panel gabungan dari data *time series* selama delapan tahun (2014-2021) dan data *cross section* dari seluruh provinsi pada Pulau Sulawesi yang berjumlah enam (6) provinsi sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 48 data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi data panel sebab data yang diperoleh merupakan data campuran atau gabungan antara data *time series* dan *cross section* dengan alat pengolahan data menggunakan *software Stata-14*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau yang ada di Indonesia. Pulau Sulawesi termasuk kepulauan terbesar ke-11 di dunia. Di Indonesia luas Pulau Sulawesi menduduki peringkat ke-4 setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Pulau Sulawesi memiliki luas sekitar 174.600 km² dan penduduk asli di Pulau Sulawesi sebagian besar adalah suku Bugis. Secara administrative, wilayah di Pulau Sulawesi terbagi ke dalam 6 provinsi yaitu: (1) Provinsi Sulawesi Utara; (2) Provinsi Sulawesi Tengah; (3) Provinsi Sulawesi Selatan; (4) Provinsi Sulawesi Tenggara; (5) Provinsi Gorontalo; dan (6) Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, Pulau Sulawesi terletak

pada koordinat 2°08'LU - 120°17'BT/2,133°LS 120,283°BT ini adalah kumpulan dari 4 lengan jazirah panjang, dengan barisan gunung berapi aktif memenuhi lengan jazirah, dimana beberapa di antaranya mencapai ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Banyaknya gunung berapi menyebabkan kondisi tanah hamper di seluruh Pulau Sulawesi menjadi subur dan ditutupi oleh hutan tropic lebat (primer dan sekunder).

Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, migas serta pertambangan nasional. Produk bahan baku utama yang dihasilkan dari sektor perkebunan adalah kakao. Perkebunan kakao di Pulau Sulawesi menduduki peringkat terbesar ke-2 di dunia. Pulau Sulawesi juga merupakan penghasil beras terbesar ke-3 di dunia. Selain itu, Pulau Sulawesi juga memiliki keindahan alam dan potensi wisata alam yang beraneka ragam yang dimana memiliki keunikan tersendiri sehingga banyak wisatawan yang ingin mengunjungi tempat wisata tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

| Variabel | Obs | Pr (Skewness) | Pr (Kurtosis) | Adj chi2 (2) | Prob>chi2 |
|----------|-----|---------------|---------------|--------------|-----------|
| uhat | 48 | 0.2403 | 0.9444 | 1.45 | 0.4840 |

Sumber: Output Stata-14

Berdasarkan tabel 1. di atas, dapat diketahui bahwa nilai p value adalah sebesar 0.4840 > 0.05 yang berarti data penelitian ini telah terdistribusi dengan normal atau dengan hipotesis nol diterima.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

| | LNPPK | TK | LNJS |
|-------|---------|---------|------|
| LNPPK | 1 | | |
| TK | -0.4731 | 1 | |
| LNJS | 0.7345 | -0.7089 | 1 |

Sumber: Output Stata-14

Pada tabel 2. di atas, dapat terlihat bahwa data di dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas dikarenakan hasil korelasi antar variabel bebasnya kurang dari 0.90.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

| | |
|-----------|--------|
| Chi2 (6) | 597.88 |
| Prob>chi2 | 0.0000 |

Sumber: Output Stata-14

Berdasarkan tabel 3. di atas, dapat dilihat bahwa model regresi memiliki nilai Prob > Chi2 sebesar 0.0000 atau kurang dari 0.05. hal tersebut menandakan bahwa model regresi terjangkit masalah heteroskedastisitas. Akibat model regresi terjangkit masalah heteroskedastisitas, maka dapat di atas dengan menggunakan Driscoll-Kraay *standard error* saat regresi pada model *fixed effect*.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

| | | | |
|---|----|----|---------|
| Wooldridge test for autocorrelation in panel data | | | |
| H0: no first-order autocorrelation | | | |
| F(| 1, | 5) | = 4.051 |
| Prob > F = | | | 0.1003 |

Sumber: Output Stata-14

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, dapat terlihat bahwa data dalam penelitian ini tidak terjangkit masalah autokorelasi pada variabel dikarenakan Prob > F memiliki nilai 0.1003 dimana nilai tersebut di atas 0.05.

Teknik Penentuan Model

Uji Hausman Test

Setelah dilakukan uji chow dan mendapat model terbaik maka selanjutnya perlu dibandingkan kembali menggunakan uji hausman. Pengujian ini digunakan dalam memilih model estimasi terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Ketentuannya bila nilai Prob>chi2 lebih besar dari 0.05 maka model yang terbaik untuk digunakan pada penelitian ini yaitu REM artinya H₁ ditolak. Apabila nilai Prob>chi2 lebih rendah dari 0.05 maka estimasi model terbaik yaitu FEM artinya H₀ ditolak. Berikut adalah hasil dari pengujian hausman test:

Tabel 5. Hasil Uji Hausman Test

| | |
|-------------|--------|
| Chi2 (3) | 55.70 |
| Prob > chi2 | 0.0000 |

Sumber: Output Stata-14

Pada tabel 5. di atas, dapat disimpulkan pada uji hausman model terbaik yang terpilih adalah FEM karena dapat dilihat Prob>chi2 memiliki nilai 0.0000 yang berarti nilainya kurang dari 0.05 maka dapat diputuskan bahwa H₀ ditolak.

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Dependent Variabel: APS

Method: Fixed-effects regression

| Variabel | Coefficient | t | P > t |
|----------|-------------|-------|--------|
| C | 10.46925 | 0.99 | 0.354 |
| LNPPK | 1.950445 | 3.25 | 0.014 |
| TK | -0.391919 | -5.96 | 0.001 |
| LNJS | 7.868448 | 3.02 | 0.019 |

Sumber: Output Stata-14

Berdasarkan tabel 6. didapatkan persamaan regresi data panel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$APS_{it} = 10.46925 + 1.950445LNPPK_{it} - 0.391919TK_{it} + 7.868448LNJS_{it} + \epsilon_{it}$$

Penjelasan persamaan regresi data panel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 10.46925 berarti jika variabel PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, jumlah sekolah dianggap konstan atau tidak terjadi perubahan maka nilai Angka Partisipasi Sekolah sebesar 10.46925.

- b. Koefisien regresi PDRB per kapita sebesar 1.950445 maka setiap perubahan satu satuan variabel PDRB per kapita akan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah sebesar 1.950445.
- c. Koefisien regresi tangga kemiskinan sebesar -0.391919 maka setiap perubahan satu satuan variabel tingkat kemiskinan akan menurunkan Angka Partisipasi Sekolah sebesar 0.391919.
- d. Koefisien regresi jumlah sekolah sebesar 7.868448 maka setiap perubahan satu satuan variabel jumlah sekolah akan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah sebesar 7.868448.

Uji Hipotesis dan Analisis Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t

Dependent Variabel: APS

Method: Fixed-effects regression

| Variabel | t | P > t |
|----------|-------|--------|
| C | 0.99 | 0.354 |
| LNPPK | 3.25 | 0.014 |
| TK | -5.96 | 0.001 |
| LNJS | 3.02 | 0.019 |

Sumber: Output Stata-14

- a. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil regresi yang menunjukkan variabel PDRB per kapita mempunyai $t_{hitung} (3.25) > t_{tabel} (2.01410)$ sementara nilai probabilitas $0.014 < 0.05$, secara statistik menandakan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap APS atau dengan kata lain H_1 pada penelitian ini diterima.
- b. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil regresi yang menunjukkan variabel Tingkat Kemiskinan mempunyai $t_{hitung} (5.96) > t_{tabel} (2.01410)$ sementara nilai probabilitas $0.001 < 0.05$, secara statistik menandakan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap APS atau dengan kata lain H_2 pada penelitian ini diterima.
- c. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil regresi yang menunjukkan variabel Tingkat Kemiskinan mempunyai $t_{hitung} (3.02) > t_{tabel} (2.01410)$ sementara nilai probabilitas $0.019 < 0.05$, secara statistik menandakan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Sekolah menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap APS atau dengan kata lain H_3 pada penelitian ini diterima

Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau yang ada di Indonesia. Pulau Sulawesi termasuk kepulauan terbesar ke-11 di dunia.

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

| | |
|----------|--------|
| F (3, 7) | 139.77 |
| Prob > F | 0.0000 |

Sumber: Output Stata-14

Berdasarkan tabel 8. di atas, diperoleh nilai f_{hitung} pada penelitian ini sebesar 139.77 yang apabila dibandingkan dengan f_{tabel} , maka nilainya lebih besar ($139.77 > 3.20431$) dan nilai probabilitasnya 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen di dalam penelitian ini yaitu PDRB per kapita, Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Sekolah menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan

terhadap variabel dependen yaitu APS secara bersama-sama atau simultan.

Uji R-Squared

Tabel 9. Hasil Uji R-Squared

| | |
|-----------|--------|
| R-squared | 0.8056 |
|-----------|--------|

Sumber: Output Stata-14

Berdasarkan tabel 9. di atas dapat terlihat bahwa nilai *R-Squared* yang di peroleh dalam penelitian ini sebesar 0.8056 berarti variabel dependen (Angka Partisipasi Sekolah) dapat dijelaskan variabel independen (PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah) sebesar 80.56%, sedangkan sisanya 19.44% Angka Partisipasi Sekolah dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Analisis Ekonomi dan Pembahasan

Analisis Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap APS di Pulau Sulawesi

Variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap APS tingkat Provinsi dalam Pulau Sulawesi periode 2014-2021. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Smith yang mengatakan bahwa upah akan lebih tinggi pada pekerjaan yang sulit dipelajari, dimana upah disini juga merupakan bagian dari upah atau pendapatan masyarakat yakni PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian dari dari upah atau penghasilan yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan produktivitas atau pekerjaan yang dimiliki seseorang. Produktivitas sendiri dapat tercipta mulai dari kebiasaan seseorang dalam lingkungan sekolah, dimana banyak hal yang dapat dipelajari dan semakin tinggi jenjang pendidikan yang di tempuh seseorang maka semakin tinggi pula produktivitas orang tersebut yang dimana nantinya pada pekerjaan juga akan mempengaruhi pendapatan yang diterimanya akan semakin besar.

Faktanya dapat terlihat dari Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah PDRB per kapita terbesar yang ditopang oleh kinerja industri pengolahan dan pertambangan yang setiap tahunnya cenderung meningkat serta wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penghasil kakao terbesar dimana hal tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Tersedianya fasilitas yang mudah dijangkau masyarakat menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan sehingga angka partisipasi sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi tertinggi diantara provinsi lain dalam Pulau Sulawesi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Megawati, 2020) yang mengatakan bahwa GDRP per capita memiliki pengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Semakin besar GDRP per capita dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, hal ini dikarenakan pendapatan per kapita juga berperan dalam mendukung masyarakat memanfaatkan fasilitas pendidikan yaitu bersekolah.

Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap APS di Pulau Sulawesi

Variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap APS Provinsi dalam Pulau Sulawesi periode 2014-2021. Terlihat koefisien dari variabel tingkat kemiskinan memperoleh nilai yang negatif maka dapat diartikan bahwa rendahnya kemiskinan akan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan begitupun sebaliknya, tingginya tingkat kemiskinan akan menurunkan angka partisipasi sekolah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Nurkse yang mengatakan tingginya tingkat kemiskinan menjadikan masyarakat miskin hidup dengan pendapatan rendah dan menciptakan produktivitas juga rendah. Terkait tingginya kemiskinan tersebut maka seseorang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam mengakses fasilitas pendidikan.

Faktanya dapat terlihat dari Provinsi Gorontalo yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi diantara provinsi lain dalam pulau Sulawesi. Hal tersebut dikarenakan rendah nya pendapatan membuat masyarakat sulit memenuhi pangannya setiap hari. Terbatasnya

perekonomian yang dimiliki membuat masyarakat sulit memenuhi gizi sehingga berdampak pada produktivitasnya. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo membuat masyarakat miskin sulit mengakses fasilitas pendidikan sehingga angka partisipasi sekolah di wilayah tersebut menempati posisi terendah kedua dibandingkan provinsi lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmatin & Soejoto, 2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah. Tingginya tingkat kemiskinan akan menurunkan angka partisipasi sekolah, hal ini dikarenakan masyarakat miskin memiliki pendapatan rendah sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Analisis Pengaruh Jumlah Sekolah Terhadap APS di Pulau Sulawesi

Variabel jumlah sekolah memiliki pengaruh positif terhadap APS tingkat Provinsi dalam Pulau Sulawesi periode 2014-2021. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Johri yang mengatakan bahwa tujuan peningkatan partisipasi sekolah khususnya untuk masyarakat tidak mampu dapat didukung dengan peningkatan sarana prasarana. Gedung sekolah mempunyai fungsi sebagai tempat berinteraksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Faktanya pada Provinsi Sulawesi Tenggara jumlah sekolah di wilayahnya setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat pendaftar di sekolah baru sehingga penyebaran pendidikan dapat terjadi. Jika dilihat dari angka partisipasi sekolah nya, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki angka partisipasi sekolah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sumarno, 2019) yang menyatakan bahwa jumlah sekolah berpengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah. Persebaran jumlah sekolah yang merata membuat masyarakat mudah dalam mengakses fasilitas pendidikan. Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk menempuh atau melanjutkan pendidikan dan akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah.

5. SIMPULAN

Variabel PDRB per kapita berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah dan memiliki koefisien positif. PDRB per kapita merupakan cerminan penghasilan masyarakat yang diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang telah mereka jalani. Semakin besar produksi masyarakat dalam sektor ekonomi di wilayahnya maka akan semakin tinggi pula penghasilan yang mereka peroleh, hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Variabel tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah dan memiliki koefisien negatif. Tingginya kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat produktivitas masyarakat yang rendah, hal tersebut dapat berdampak pada produksi yang dihasilkan dimana saat produktivitas masyarakat yang lemah maka produksi yang dihasilkan pun juga rendah. Kondisi seperti itu dapat menyulitkan masyarakat dalam membiayai kebutuhan pendidikan dikarenakan pendapatan mereka yang rendah membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pendidikan. Variabel jumlah sekolah berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah dan memiliki koefisien positif. Bangunan atau gedung sekolah merupakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, dimana penambahan dan persebaran jumlah sekolah yang merata akan membuat masyarakat dengan mudah mengakses fasilitas pendidikan yang dimana hal tersebut akan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Diharapkan pemerintah daerah mampu merealisasi belanja fungsi pendidikan dengan maksimal dan dapat membuat rancangan prioritas terkait penambahan fasilitas pendidikan yaitu bangunan atau gedung sekolah serta pemerintah daerah sebaiknya dapat memfokuskan beasiswa atau bantuan kepada masyarakat miskin sehingga dapat memberikan pengaruh yang

lebih baik lagi terhadap partisipasi pendidikan yakni angka partisipasi sekolah serta bagi pemerintah daerah sebaiknya perlu memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan yakni angka partisipasi sekolah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pada tangka angka partisipasi sekolah seperti PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E. (2019). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur). *J-Mas (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 176-183. doi:10.33087/jmas.v4i1.86
- Ariani, M. N., & Juliannisa, I. A. (2021). Analisis Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 1-12.
- Bado, B., Hasbiah, S., Hasan, M., & Alam, S. (2017). *Model Kebijakan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi*. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca Makasar.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2021). *Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo*. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
- Dinas Komunikasi Informatika Pemerintah Sulawesi Selatan. (2022). *Atasi Anak Putus Sekolah Bappelitbangda Sulsel Launching Pasti Beraksi*. Retrieved from Sulselprov-go-id: https://sulselprov-go-id.translate.google/welcome/post/atasi-anak-putus-sekolah-bappelitbangda-sulsel-launching-pasti-beraksi?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2021). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gorontalo, B. P. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo Tahun 2021*. Gorontalo: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
- Karini, P. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, Vol. 10 No. 1.
- Karno, E. (2016). Pemerintah Responsif Pendidikan: "Kajian Atas "Program Cerdas Sultraku" Di Sulawesi Tenggara. *Shautut Tarbiyah*, VOL 22, No 2.
- Logaritma, S. (2022). *Produk Domestik regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik.
- Megawati. (2020). The Effect of Government Education Spending on School Enrollment in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 20, No 1, 288-294.
- Mohammed, H., Yusuf, S., & Omar, M. (2021). Government Expenditure and Performance of Public Secondary Schools in Zanzibar. *International Journal of Sciences: Secondary Schools in Zanzibar*, Volume 55, No 2, 139-155.

- Parmo, Sucipto, M. H., & Sumarkan. (2016). Penilaian Kondisi Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Madiun. *EMRA Indonesia Journal of Architecture*.
- Pezzulo, C., Alegana, V. A., Christensen, A., Bakari, O., & Tatem, A. J. (2022). Understanding Factors Associated With Attending Secondary School In Tanzania Using Household Survey Data. *Plos One*.
- Prasojo, L. D., Mukminin, A., & Mahmudah, F. N. (2017). Manajemen Strategi Human Capital Dalam Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu.
- Rahmadeni, Samsinar, & Desvina, A. P. (2020). 2. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Angka Partisipasi Sekolah Di Provinsi Riau Menggunakan Model Spatial Autoregressive. *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI) 12*.
- Rahmatin, U. Z., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan*, 127-140.
- Saraswati, S. W., & Cahyono, H. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap PDRB per Kapita Di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 2, No 3.
- Sartiyah, Hartoyo, S., Syaikat, Y., & Oktaviani, R. (2017). The Effect of Government Spending on Education in Aceh Province Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*.
- Shafuda, C. P., & De, U. K. (2020). Government Expenditure om Human Capital and Growth in Namibia: a time series analysis. *Journal of Economic Structures*.
- Silviliyana, M., Maylasari, I., Agustina, R., Dewi, F. W., & Sulistyowati, N. P. (2019). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Sopian, A. (2019). Manajemen Sarana Dan Prasarana. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sumarno. (2019, Juni). Angka Partisipasi Sekolah Kasar SMA Rendah Dampak Dari Tingkat Kemiskinan dan Upaya Mengatasinya Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 21.
- Suwandana, E. (2018). Tingkat Partisipasi Sekolah Dan Indikator Ekomomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 20-23.
- Widiadnyani, N. L., Suciptawati, N. L., & Susilawati, M. (2019). Model Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMA Sederajat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Matematika Vol. 8(3)*, 179-183.
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala*.